

400 Pegawai Honorer Masih Belum Gajian

Manajemen RSUD Ajukan di APBD-P 2018

BATAM KOTA – RSUD Embung Fatimah masih menunggak pembayaran gaji 400 orang pegawai honorer untuk bulan Desember 2017. Untuk membayar gaji ratusan pegawai, manajemen akan mengajukan anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018 mendatang.

Direktur RSUD Embung Fatimah Ani Dewiyana mengatakan, tunggakan gaji pegawai yang belum dibayarkan hanya pada bulan Desember 2017 saja. Sementara gaji bulan Januari 2018 ini sudah dibayarkan.

Total pegawai dan petugas medis di rumah sakit pemerintah itu ada sebanyak 623 orang.

Dari jumlah itu, PNS ada sebanyak 243 orang. Sementara 380 lainnya masih berstatus pegawai honorer. "Jadi kami usulkan sekitar 400 lebih. Karena kan PNS sekitar 200 lebih, sedangkan pegawainya 600 orang," ujarnya di DPRD Kota Batam, Rabu (25/4). Selain pembayaran gaji pegawai, RSUD ju-

” Jadi kami usulkan sekitar 400 lebih. Karena kan PNS sekitar 200 lebih, sedangkan pegawainya 600 orang.

ANI DEWIYANA
Direktur RSUD Embung Fatimah

ga mengajukan anggaran untuk pembayaran utang pembayaran obat ke beberapa vendor. Ani menambahkan, pihaknya terus melakukan perbaikan-perbaikan di rumah sakit plat merah itu. Tapi ia enggan menyebutkan besaran anggaran yang diajukan tersebut. "Utang obat belum semuanya. Ada juga yang sudah

kami bayarkan. Sisanya juga diajukan di APBD perubahan dan tahun 2019," katanya.

Menurut dia, kerja sama dengan vendor juga sudah bisa dilaksanakan. Namun untuk pengadaan obat tidak bisa cepat dan harus mengikuti mekanisme yang berlaku.

Ke hal 12))

400 Pegawai ...

((Dari hal 9

"Kami juga pakai e-katalog. Tidak bisa sehari atau dua hari langsung datang. Mungkin sekitar seminggu atau dua minggu baru datang. Karena semua pakai proses," kata Ani.

RSUD, sambungnya, telah melakukan kesepakatan dengan vendor obat terkait utang piutang kedua belah pihak. Seluruh utang akan dimasukkan ke dalam neraca utang dan akan diganti setelah uangnya ada. "Jadi semua vendor sudah buka semuanya. Dua atau tiga minggu ini, Mei sudah bisa semuanya. Tapi memang butuh proses," ujarnya.

Ia menambahkan, pengelolaan keuangan di RSUD terus dibenahi. Saat ini, pihaknya sudah memiliki saldo keuangan untuk digunakan sebagai anggaran operasional. "Sekarang pembenahan terus berjalan. Sekarang kami punya saldo untuk operasional rumah sakit. Pusing kan kalau tak ada uang untuk operasional," katanya.

Sedangkan alat kesehatan (alkes), juga terus diperbaiki. RSUD sudah bisa melakukan operasi dan beberapa ruangan sudah bisa digunakan seperti ruang ICU,



KORAN SINDO BATAM/TEGUH PRIHATNA

operasi dan ruang radiologi serta lainnya. "Kenapa pegawai kami banyak. Karena setiap satu ruangan itu ada 4 shif. Semakin banyak ruangan, semakin banyak pegawai yang melayani," ujarnya.

Sebelumnya, Ani mengatakan, akan secepatnya menyelesaikan tunggakan gaji pegawai RSUD Embung Fatimah. Ia memastikan awal Februari sudah tak ada lagi tunggakan gaji pegawai.

Menurut dia, masih ada tunggakan terkait masalah gaji karyawan. Gaji bulan Januari 2018 sudah dibayarkan, dan masih menunggak gaji pegawai bulan Desember 2017. "Kami usa-

hakan awal-awal Februari persolan gaji ini sudah beres," ujarnya.

Ani menjelaskan, saat ini ada 623 orang karyawan di RSUD Embung Fatimah. Jumlah tersebut, terdiri dari karyawan PNS dan non PNS. Karyawan PNS terdiri dari dokter spesialis 41 orang, dokter umum 9 orang, dokter gigi 3 orang, perawat 79 orang, bidan 20 orang, non keperawatan 48 orang, dan tenaga teknis lainnya 20 orang.

Sedangkan untuk karyawan non PNS terdiri dari 14 dokter spesialis, 6 dokter umum, 158 keperawatan, 59 non keperawatan, dan 113 tenaga teknis

lainnya. "Dari 230 karyawan non PNS itu yang masih belum menerima gaji bulan Desember 2017," kata Ani.

Tertunggaknya gaji pegawai ini imbas dari buruknya sistem manajemen di RSUD Embung Fatimah. Salah satunya adalah pengajuan klaim tahun 2014 dan 2015 ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar Rp2,4 miliar hangus. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) disebutkan batas waktu maksimal pengajuan klaim adalah 2 tahun setelah pelayanan diberikan.

Sekretaris Komisi IV DPRD

Warga melintas di depan ruang IGD RSUD Embung Fatimah, Batuaji, beberapa waktu lalu.

Kota Batam Udin P Sihaloho mengatakan, keterlambatan pengajuan klaim yang dilakukan oleh RSUD merupakan dampak dari tak transparansinya pengelolaan manajemen di rumah sakit ini.

"Ini bentuk tidak adanya transparansi di rumah sakit. Mereka tidak mau menggunakan sistem online untuk pasien BPJS. Sehingga ini menjadi kerugian RSUD," ujarnya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama RSUD Embung Fatimah, BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Batam di aula Komisi IV DPRD Batam, Jumat (19/1).

Menurut Udin, layanan di RSUD setara dengan rumah sakit tipe D dan perlu dilakukan pembenahan serta perbaikan maksimal dengan dukungan semua pihak terkait, seperti BPJS Kesehatan. "RSUD ini BLUD dengan anggaran Rp77 miliar. Kemudian dapat bantuan lagi dari APBD, dokter dapat bantuan. Kalau seperti ini masyarakat beli obat di luar, lalu bagaimana struknya. Itu kan salah satu syarat untuk klaim juga," katanya.

● iwan sahaputra

Jalan Raja Fisabilillah Selesai Tahun Depan

BATAM KOTA – Penataan Jalan Raja H Fisabilillah, penghubung Simpang Laluan Madani dengan Simpang BNI Seipanas ditargetkan selesai 2019 mendatang. Pada sisi kanan, jalur Seipanas-Laluan Madani telah selesai pelebarannya, tinggal melanjutkan pembangunan jalur pejalan kaki atau pedestrian.

"Pejalan kaki dibangun, sekalian dibangun halte. Itu tahun depan," kata Wali Kota Batam Muhammad Rudi saat meninjau pemupukan pohon

di jalur tersebut, kemarin.

Dia mengatakan, halte yang dibangun nanti berbeda dengan halte sebelumnya. Halte lama telah dibongkar saat proses pelebaran jalan 2017 lalu. Posisi halte nanti akan digeser sedikit ke bagian tengah, sehingga tidak terlalu dekat dengan persimpangan jalan. "Haltenya nanti yang bagus. Modelnya nanti double, bisa menghadap sana (pertokoan) bisa menghadap sini (jalan)," ujarnya.

Ke hal 12))



Jalan Raja ...

((Dari hal 9

Selain meninjau lokasi halte pengganti, Wali Kota juga melihat lahan yang akan dibangun taman aktif di sisi seberang. Tepatnya di depan pertokoan Edukits sampai ke batas tanah apartemen Oxley.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan (Disperkimtan) Kota Batam, Eryudhi Apriadi mengatakan taman ini nanti bisa difungsikan untuk segala aktivitas masyarakat. "Untuk aktivitas ekonomi nanti ada tempat jualan. Aktivitas sosial seperti acara perkumpulan juga

bisa. Jogging track juga akan kami bikin," kata Eryudhi.

Selain itu, kegiatan Pemko Batam juga bisa dialihkan ke lokasi ini. Misal untuk titik awal pawai atau takbiran. Bahkan jika memungkinkan, akan dibuat acara malam tahun baru di taman ini untuk memecah konsentrasi massa di alun-alun Dataran Engku Putri. "Tahun ini kami anggarkan untuk DED (detailed engineering design) dan pengerasan. Kami buat desainnya dulu. Tahun depan dilanjutkan pembangunan," kata Sekretaris Dinas Pariwisata ini.

● **iwah sahaputra**